

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015:2). Kualitas laporan keuangan merupakan suatu informasi yang dapat memudahkan pengguna dan pembaca untuk memahami dan dapat diasumsikan dalam pengetahuan yang memadai tentang suatu aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta dapat mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Didalam laporan keuangan informasi yang bermanfaat harus relevan untuk memenuhi suatu kebutuhan pemakai guna memproses untuk pengambilan keputusan (Zamzami dan Nusa, 2016:9).

Fenomena pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) saat ini perlu untuk diteliti kembali. Adapun fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember Tahun 2019 mendapat penilaian buruk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Penilaian tersebut diberikan lantaran BPK Tidak Menyatakan Pendapat (TWP) atau *disclaimer of opinion*. Dalam penilaiannya, BPK membagi dalam

empat kategori yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan tidak menyatakan pendapat. Artinya, penilaian tidak menyatakan pendapat merupakan penilaian terendah atas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil laporan tersebut disampaikan secara daring, diikuti oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Bupati Jember Faida, Selasa (30/6/2020). Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengaku, tidak menduga atas penilaian buruk yang diberikan. Dia mengemukakan, penilaian tersebut menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Laporan Keuangan Pemkab Jember. (Itqon Syauqi, 2020).

Penyebab BPK tidak menyatakan pendapat diduga karena tim auditor tak mendapatkan bukti pemeriksaan yang cukup untuk melakukan penelusuran dan pemberian penilaian. Kemungkinan terjadi fraud atau penyimpangan penyajian laporan keuangan negara. Sayangnya, paparan secara online dirasa Itqon terlalu cepat sehingga tidak bisa mendapatkan keterangan secara detail perihal penilaian laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, dia merencanakan mengajak pimpinan DPRD Jember mengunjungi Kantor BPK untuk memastikan mendapat keterangan penilaian secara detail terkait penyimpangan penyajian laporan keuangan. Penilaian tersebut menurut Itqon menjadi bukti buruknya akuntabilitas Pemkab Jember sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD Jember. Sebelumnya, DPRD Jember telah melakukan pengawasan dengan membentuk tim hak angket DPRD Jember. Hasilnya banyak temuan panitia hak angket terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di dalam Pemkab Jember. (Itqon Syauqi, 2020).

Tahun Anggaran 2020 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung (Agus Khotib, 2020). Prestasi ini merupakan raihan tiga kali secara beruntun oleh Pemda Kota Bandung di bawah kepemimpinan Walikota Bandung Oded M. Danial dan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Walikota menuturkan, ketika di tahun 2020 lalu harus ada sejumlah perubahan anggaran berkenaan dengan penanganan pandemi COVID-19, hal itu tak lantas membuat bingung, karena walikota telah mewanti-wanti agar kecepatan penanganan tetap mengikuti regulasi penganggaran. (Oded M. Danial, 2021).

Walaupun sudah kali ketiga mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), ada beberapa catatan yang diberikan salah satunya terdapat kesalahan dalam meng-*input* laporan keuangan dari beberapa SKPD yang ditemukan oleh BPKA Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irawan salah satu pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung, menyebutkan bahwa terkadang masih ditemukan kesalahan/kekeliruan dalam pencatatan transaksi pada perangkat daerah. Hal ini dikarenakan ketidaktelitian dan kurangnya evaluasi pada bagian pelaporan keuangan dalam meng-*input* laporan keuangan ke dalam sistem yang disebut SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah (Irawan, 2021). Setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD ataupun pendapatan dicatat ke dalam sistem ini. Setiap pegawai BPKA Kota Bandung harus memahami bagaimana menggunakan

SIMDA ini. Begitupun keandalan laporan keuangan pada BPKA Kota Bandung, masih ditemukan perangkat daerah yang menyampaikan informasi transaksi keuangan disajikan kurang lengkap dan belum sesuai, sehingga BPKA perlu menangani lebih lanjut kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan ini, yaitu dengan cara memeriksa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO), apabila terjadi selisih diantara kedua laporan tersebut maka harus ditindak dan diteliti lebih lanjut oleh BPKA untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab perbedaan selisih pada LRA dan LO tersebut. (Wawan Darmawan, 2021)

Sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan andal jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur, netral serta dapat diverifikasi. Salah satu tujuan pelaporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yaitu untuk menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Oleh karena itu, berdasarkan PP No 71 tahun 2010 proses pelaporan keuangan pemerintah harus dikerjakan oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas agar dapat menyajikan laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dapat diandalkan dan dapat diverifikasi.

Menurut Goetsch & Davis dalam Tjiptono & Chandra (2016:115), menyatakan bahwa kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan

terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya.

Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang mempunyai kualitas yang baik, memiliki pemahaman akuntansi dan keuangan serta mempunyai pendidikan dengan latar belakang yang sesuai pada tanggungjawabnya yaitu akuntansi dan keuangan, akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan yang baik (Saraswati dan Budiasih, 2019). Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. (Abdul Halim, 2014:83). Kualitas pelaporan keuangan merupakan kegiatan pelaporan yang didasarkan oleh karakteristik kualitatif informasi keuangan dengan pengungkapan secara penuh seta wajar yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik dan memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. (Yadiati, 2017:32).

Penelitian ini diharapkan sejalan dengan penelitian Abdullah Taman & Putriasri Pujanira (2017), Hadi Jauhari, dkk. (2021), Andi Patra, dkk. (2016), Yulia Defitri (2018), dan Lia Hanifa, dkk. (2016) yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ditambah lagi dengan penelitian Nur Ulfiati (2017), Liza Mutiana, dkk. (2017), Agum Gumelar (2017), dan Wardani & Ika Andriyani (2017) yang menyimpulkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas serta melihat pentingnya kualitas laporan keuangan daerah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Masih ditemukan kesalahan pencatatan ke dalam laporan keuangan di perangkat daerah Kota Bandung.
2. Ketidaktepatan bagian pelaporan keuangan dalam meng-*input* laporan keuangan ke dalam sistem yang disebut SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, antara lain :

1. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung.

2. Seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis informasi beserta data yang relevan mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung serta untuk memperoleh gambaran perbandingan antara teori dengan pelaksanaannya di lapangan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung

Memberikan masukan tentang bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung

Memberikan masukan tentang pemahaman penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, dan disamping itu, penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi :

1. Pengembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi mengenai penerapan sistem akuntansi

keuangan daerah dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

2. Peneliti

Penelitian ini dijadikan sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

3. Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji di bidang yang sama.